**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arba, H. M.. *Hukum Agraria Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Refika Aditama, 2018.

Chomsah, Ali Achmad, *Hukum Agraria, Jilid II Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I,* Jakarta: Djambatan. 2005.

Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, cet I, Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, 2003,

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi).* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Kansil, CST, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2014.

Menggala, Hasan Basri Nata & Sarjita, *Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2004.

Parlindungan. A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia,* Bandung: Mandar Maju. 1999.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria*, Jakarta: Kencana, 2013.

Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah,* Cetakan III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

Sodikin, Achmad, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompress, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

Sumardjono, Maria S. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tanjung, Nugroho, “Pembuatan Gambar Ukur DanPengembalian Batas” , Modul MKB-4/3 SKS/ MODUL I-IX, Nopember. 2011.

Tranggono, *Pengukuran dan Pemetaan Kadastral,* Yogyakarta: STPN. 1997.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Yamin, Muhammad, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju, 2011 Mukti Fajar ND dan, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

**Jurnal**

Arvita, Rani. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable PTUN Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, ***Jurnal Media Hukum,*** Vol. 23 No.1 Juni 2016.

Harsono, Boedi, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sesuai Ketentuan-Ketentuan dalam UUPA”, makalah disampaikan dalam Seminar HUT UUPA XXXVI, 1996, yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta 22 Oktober.

Hidayat, Akmal. “Pendaftaran Tanah yang Menggunakan Sistem Negatif Bertendensi Positif dan Pengaruhnya Terhadap Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Brebes”, 2007, *Skripsi,* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Kurniati, Nia. “Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah”, **Sosiohumaniora**, Volume 18 No. 3, 2016.

Pebriadi, Ali, dkk., “Studi Tentang Pengukuran dan Pemetaan Pada Pelaksanaan Landreform di Indonesia (Studi Kasus : Desa Pangkah Kulon, Gresik)”. 2018, Surabaya: Institute Teknologi Surabaya.

Riyadi, Bambang Slamet. “Law of agrarian conflict and resolution effort: A claim dispute of Eigendom verponding Land,” *International Journal of Law*, Volume 3; Issue 3, 2017.

Saputro, Doni, Setiaji, dan Martien Herna Susanti, “Peran Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Pakis dengan Perhutani Kabupaten Kendal”, *Unnes Political Science Journal*, Vol. 1, No. 2, 2017

Siswanto, Agus. “Perlindungan Hukum Terkait Perbedaan Luas Faktual Dalam Pengukuran Oleh Petugas Ukur Terhadap Luas Yang Tercantum Di Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta”. *Dinamika Hukum*, *10* (2). Surakarta: Magister Hukum Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\_Hukum/article/view/4335.

Syahyuti. “Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 22 No. 2, 2004

Tiksna, Dutya Nirmala. “Kajian Mengenai Penyelesaian Perbedaan Luas Tanah di Letter C dengan Hasil Ukur dari Kantor Pertanahan”, **Skripsi**, Jember: Universitas Jember.

Yulianto, Evan Sulton. “Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi (KJSKB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung”, 2019, *Skripsi*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

**Internet** :

Erwin Hutapea, https://properti.kompas.com/read/2019/01/28/203121221/ baru-40-persen- masyarakat-indonesia-yang-memiliki-sertifikat-tanah, edisi 28 Januari 2019

M. Lutfi Chakim , Perbedaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Hukum Acara Perdata, http://www.lutfichakim.com/ 2011/12/ perbedaan-hukum-acara- peradilan-tata.html

Ridwan, Penyuluh Hukum Madya, https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2721

Rizkan Zulyadi, dalam https://hukum.uma.ac.id/2021/01/15/apa-itu-hukum- pertanahan-land-law/

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.